

Masalah *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pandangan Teori

Kritis Jürgen Habermas

(Wilfridus Ruben Bau: 19. 75. 6708)

Abstrak

Provinsi NTT telah dikategorikan sebagai wilayah paling rawan terhadap polemik human trafficking atau perdagangan orang. Human trafficking merupakan praktik relasi sosial bercorak a-simetris-dominasi demi memaksimalkan self interest yang bebas nilai (etis) karena menciptakan kebangkrutan moral; atau, praktik yang bertendensi menguasai sesama karena memanfaatkan keadaan represif sesama. Rasionalitas yang bekerja dalam praktik human trafficking adalah rasionalitas instrumental. Berhadapan dengan situasi krisis bebas nilai (etis) praktik human trafficking, maka pada kesempatan ini, penulis akan fokus mengulas teori kritis Jürgen Habermas yang mempunyai kepentingan (etis) emansipatoris dalam mengatasi dan mencegah praktik human trafficking. Rasionalitas yang bekerja dalam teori kritis Habermas ialah rasionalitas komunikatif sebagai upaya untuk merekonstruksi kesederajatan relasi sosial agar dalam kehidupan bersama, secara khusus di wilayah NTT, tidak terdapat lagi praktik (relasi) mendominasi atau menguasai sesama (yang lain).

Kata-kata kunci: *Human trafficking*, rasionalitas instrumental, teori kritis, rasionalitas komunikatif, emansipatoris.

Pendahuluan

“Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan privilese untuk bebas menguasai orang lain”. Bertolak dari pernyataan universal tersebut kerap kali dalam fenomena sosial terdapat unsur kekuasaan (dominasi) dari sepihak dalam suatu relasi sosial. Fenomena dominasi sepihak dalam suatu relasi sosial mengindikasikan bahwa dalam relasi sosial tersebut, terdapat penindasan (penguasaan) dari pihak tertentu terhadap pihak yang lain. Salah satu kasus yang merepresentasikan relasi dominasi terhadap yang lain dan marak terjadi dalam kehidupan bersama ialah praktik *human trafficking* atau perdagangan orang.

Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai *locus* yang paling rawan terhadap polemik *human trafficking* atau perdagangan orang.¹ *Human trafficking* adalah praktik relasi sosial yang menimbulkan kesan dominasi dan penderitaan terhadap sesama manusia dalam kehidupan bersama. Polemik *human trafficking* menggambarkan situasi manusia yang mementingkan dirinya lalu mengabaikan yang lain; situasi dimana setiap orang berlomba-lomba mengaklamsikan dirinya sebagai subjek dan yang lain diletakkannya pada tataran objek. Polemik *human trafficking* juga memperlihatkan dekadensi kemanusiaan dimana rendahnya penghargaan terhadap nilai-nilai etis seperti: keadilan, kebebasan, hak serta harkat dan martabat manusia. Adapun fenomena ontologis (yang tak kelihatan) dibalik praktik *human trafficking* yaitu rasionalitas instrumental. Cara kerja rasionalitas instrumental dalam relasi sosial ialah memperdaya (memanfaatkan) yang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; atau sebuah praktik merasionalisasikan (menghalalkan) segala cara demi kepentingan sepihak. Hal itu berarti, *human trafficking* adalah praktik yang bercorak bebas nilai atau kepentingan (etis) terhadap yang lain karena bertujuan memperdaya yang lain demi kepentingan sepihak melalui cara kerja rasionalitas instrumental.

Konsekuensi lanjutan dari polemik *human trafficking* juga adalah menciptakan sebuah tempat yang berbahaya karena orang-orang yang tinggal dalam tempat tersebut dirundung sikap ketidakpedulian, entah itu terhadap dirinya sendiri maupun terhadap keberadaan orang lain. Ketidakpedulian kepada diri sendiri dan sesama adalah suatu sikap dan tindakan apatis terhadap eksistensial manusia dengan nilai-nilai dan makna kehidupan. Sehingga, bertolak dari statusnya sebagai *locus* yang paling rawan, tidak keliru apabila polemik ini terkesan tidak diperhatikan secara teliti oleh pihak pemerintah dan rakyat NTT. Lemahnya kontribusi pemerintah dan masyarakat pada tataran individu maupun sistem (aturan-aturan dan instansi-instansi pemerintahan) serta LSM, turut menjadi penyebab maraknya praktik *human trafficking* atau perdagangan orang.

Berhadapan dengan polemik *human trafficking* di NTT, yang menggambarkan disorientasi dalam relasi sosial, penulis memberi langkah solutif bertolak dari sumbangsih pemikiran teori kritis Jürgen Habermas. Dalam teori kritisnya, Habermas menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif dalam relasi sosial. Cara kerja rasionalitas komunikatif

¹Korban dari praktik *human trafficking* paling rawan dialami oleh anak kecil, perempuan muda-dewasa dan pria dewasa. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang miskin dengan sumber daya manusia (SDM) yang rendah sehingga mereka tertipu dengan mudah oleh tawaran yang menggiurkan dari para calo.

tersebut ialah membuat relasi sosial menjadi setara dan harmonis karena bebas penguasaan (dominasi) dan tidak mengikuti hasrat *selfinterest* yang mengabaikan sikap kepedulian terhadap diri sendiri dan keberadaan orang lain. Dengan kata lain, teori kritis Habermas juga bersifat emansipatoris terhadap relasi sosial yang bermasalah dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis hendak merespon polemik *human trafficking* di NTT, dalam perspektif teori kritis Jurgen Habermas sebagai upaya untuk merekonstruksi relasi sosial dengan pembentukan pola pikir rasionalitas komunikatif-emansipatoris agar dalam kehidupan bersama, secara khusus di wilayah NTT, tidak terdapat lagi praktik (relasi) mendominasi atau menguasai sesama yang lain, dengan judul tulisan: “*Human Trafficking* di NTT dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas”.

Pengertian *Human Trafficking*

Human trafficking atau perdagangan orang merupakan fenomena relasi sosial yang bermasalah dalam kehidupan bersama karena mengandung penguasaan, ketidakadilan, ketidakbebasan, ketidaksetaraan, atau mengorbankan hak hidup manusia. Praktik *human trafficking* menjadi gambaran pertandingan kepentingan segelintir orang dalam relasi sosial; atau, secara ontologis, praktik *human trafficking* tidak mengakui keberadaan ‘yang lain’ dalam hidup bersama. Praktik *human trafficking* juga adalah bentuk lain dari afirmasi diri yang solipsis bahwa di luar aku tidak ada yang eksis. Akibatnya adalah instrumentalisasi sesama yang lain.² Rakyat diperalat, orang miskin, orang lapar dan yang haus dipolitisasi dengan berbagai teknik dan cara termasuk melalui tawaran-tawaran yang bohong. Realitas semacam ini tentu memprihatinkan, sebab nilai-nilai kemanusiaan sudah diabaikan begitu saja karena *selfinterest* atau kepentingan pribadi yang bebas nilai. Manusia tidak lagi saling membangun rasa kepedulian satu terhadap yang lain, tetapi telah menjadi serigala bagi yang lain atau *Homo homini Lupus*.

Penulis memfokuskan pengertian *human trafficking* berdasarkan konsep pandangan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menegaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

²Felix Baghi, *ALTERITAS Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)* (Maumere: Ledalero, 2012), hlm. 9.

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Model-Model *Human Trafficking*

Kasus *human trafficking* atau perdagangan orang bisa nampak dalam aneka model. *Pertama, labor trafficking* atau perdagangan tenaga kerja. Perdagangan tenaga kerja dipahami sebagai perekrutan, penampungan, pengiriman, persediaan, atau perolehan seseorang untuk tenaga kerja atau pelayanan, dengan cara kekerasan, penipuan, pemaksaan, untuk tujuan perhambaan yang tidak dikehendaki, praktik kerja paksa, perhambaan hutang, atau perbudakan.³ *Kedua, bride trafficking* atau perdagangan perkawinan. Perkawinan menjadi salah satu tindakan terselubung dalam kasus *human trafficking* seperti salah satu cara penipuan, kemudian dieksploitasikan ke tempat prostitusi demi kepentingan pelaku. Jadi, dalam *bride trafficking* korban dimanipulasi dan dieksploitasi.

Ketiga, sex trafficking atau perdagangan seks. Perdagangan seks merupakan tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, persediaan, atau perolehan seseorang untuk tujuan kegiatan seks komersial, dengan cara kekerasan, penipuan, atau dengan cara mempengaruhi seseorang yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan kegiatan tersebut.⁴ Dalam konteks ini, korban mengalami eksploitasi komersialisasi seks seperti prostitusi, pornografi, tarian telanjang, pertunjukan seks dan *sex party*. *Keempat, organ trafficking* atau perdagangan organ tubuh. Pada tataran ini, pelaku sudah terlebih dahulu menargetkan korban dari tindakan tersebut. Motifnya bisa melalui penipuan, pemaksaan, kekerasan sampai pada level pembunuhan. Harga organ tubuh yang sangat tinggi mendorong banyak pelaku menargetkan korban-korban dari kekejian itu. Perdagangan ini erat kaitan dengan proyek penyembuhan dan dunia kedokteran. Misalnya penyembuhan pasien yang membutuhkan transplantasi jantung atau organ tubuh lainnya.

³Mark Hoerrner dan Keisha Hoerrner, "Human Trafficking" dalam Mary De Chesnay (ed.), *Sex Trafficking: A Clinical Guide For Nurses* (New York: Springer Publishing Company, 2013), hlm. 27.

⁴ *Ibid.*

Polemik *Human Trafficking* di NTT

Perdagangan orang menjadi isu aktual yang paling rawan di provinsi NTT. Hal itu terlihat jelas melalui laporan Advokasi, Eliminasi dan Pencegahan Pekerja Anak NTT, dari tahun 2000 hingga Juni 2010 terdapat 14.848 TKI yang menjadi korban perdagangan orang.⁵ Sedangkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2010 hingga 2013 terdapat 2.431 orang calon TKI asal NTT yang ilegal dan gagal diberangkatkan. Perinciannya yakni 1.447 laki-laki dan 984 perempuan. Tahun 2010 terdapat 1.158 orang yang terdiri dari 793 laki-laki dan 365 perempuan. Tahun 2011 terdapat 590 TKI ilegal yang berhasil digagalkan keberangkatannya, dengan perincian 384 laki-laki dan 206 perempuan. Tahun 2012 terdapat 83 TKI ilegal yang digagalkan keberangkatannya, 78 laki-laki dan 5 perempuan. Sedangkan tahun 2013 terdapat 400 TKI ilegal dengan rincian 212 laki-laki dan 188 perempuan.⁶ Angka-angka di atas tentu menggambarkan betapa maraknya kasus *human trafficking* di NTT, dan secara khusus merepresentasikan disorientasi relasi sosial dalam kehidupan bersama.

Penyebab *Human Trafficking* di NTT

Ada beberapa faktor penyebab *human trafficking*. *Pertama*, minimnya pengetahuan atau sumber daya manusia. Para korban *human trafficking* tidak memiliki pemahaman yang spesifik maupun komprehensif mengenai praktik *human trafficking*, prosedural ketenagakerjaan yang legal, minimnya kreatifitas untuk menciptakan usaha atau lapangan pekerjaan, munculnya mental *instant*, dan rendahnya proyek perencanaan dalam jangka pendek maupun panjang untuk suatu kehidupan yang lebih damai dan sejahtera. *Kedua*, kualitas ekonomi rumah tangga yang rendah (kemiskinan). *Problem* kemiskinan telah memaksa rakyat NTT untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka, termasuk bermigrasi ke tempat lain untuk bekerja dan memperbaiki nasib hidup mereka. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan-minum, kesehatan, pendidikan, pakaian, tempat berlindung atau rumah, dan kebutuhan pokok lainnya mendorong mereka mengambil keputusan untuk merantau sekalipun itu melalui prosedur yang ilegal.

Ketiga, pemerintah belum mendukung kehidupan masyarakat. Hal ini nampak jelas dalam kebijakan-kebijakan yang belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk

⁵Robert Minsel dan John Manehitu, "Komoditi Yang Disebut Manusia: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia di NTT dalam Pemberitaan Media", *Jurnal Ledalero*, 13:2 (Ledalero: Desember 2014), hlm.372.

⁶*Ibid.*, hlm. 373.

masyarakat, akibatnya persentase kemiskinan, pengangguran dan perantauan terus melonjak dari tahun ke tahun. Kemiskinan bisa juga menyangkut tiadanya kebebasan politik dan keterbatasan ruang partisipasi yang menghalangi warga untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Konsekuensi dari kondisi semacam ini membuat rakyat NTT harus berada dalam kondisi yang tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber kesejahteraan dan keadilan. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa kemiskinan bukan hanya berkenaan dengan soal ketidakadilan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik secara ekonomis agar mampu memenuhi kebutuhan konsumtifnya, melainkan suatu gambaran kondisi tidak adanya pemerataan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak dasar.

Keempat, cacatnya fungsi dari pihak penegak hukum seperti pemerintah, aparat keamanan, dinas ketenagakerjaan maupun komunitas keagamaan. Pemerintah dan lembaga-lembaga sosial minim menyosialisasikan secara langsung tentang bahaya *human trafficking* kepada rakyat NTT dan bagaimana setiap orang berusaha untuk menjalani kehidupannya dengan baik, tanpa harus menjadi korban perdagangan orang. Aparat keamanan belum memaksimalkan kinerjanya dan malah membantu memperlancar perekrutan tenaga kerja ilegal. Sedangkan komunitas keagamaan pun lemah dalam menganimasi rakyat NTT soal bagaimana menghargai hidup, mencintai dan mengasihi yang lain.

Biografi Singkat Jürgen Habermas

Jürgen Habermas lahir pada tahun 1929 di Gummersbach, Jerman. Ia memulai studi filsafat pada Universitas Bonn hingga meraih gelar doktor pada tahun 1954 dengan disertasi *Das Absolut Und Geschichte* (Yang Absolut Dan Sejarah). Pada tahun 1956, ketika ia diangkat menjadi asisten Theodore Adorno, Jürgen Habermas menggabungkan diri ke dalam Institut penelitian sosial di Frankfurt yang kemudian menjadi pendukung utama tradisi pemikiran kritis Sekolah Frankfurt. Pada tahun 1970, ia mengundurkan diri dari Universitas Frankfurt dan menerima tawaran untuk bergabung ke dalam Institut lain di kota Starnberg, yaitu Max Planck Institut, yang mempelajari kondisi-kondisi kehidupan ilmiah-teknis. Di kemudian hari Habermas dikenal sebagai pembaharu Teori Kritis yang sudah dibangun oleh generasi pertama: Th. W. Adorno, Horkheimer, Hurbert Marcuse. Teori Kritis berusaha melawan hegemoni aliran positivisme dalam pelbagai bidang kehidupan.⁷

Teori Kritis Jürgen Habermas

⁷Bahan Kuliah Dr. Otto Gusti Madung dalam Postmodernisme.

Sekilas tentang teori kritis. Teori kritis lahir sebagai usaha mengkritisi hegemoni beberapa pendirian sentral aliran positivisme: *Pertama*, positivisme menetapkan suatu kesatuan metode ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Adapun prinsip dari teori-teori positivisme ialah mencita-citakan suatu bentuk pengetahuan yang bebas nilai (kepentingan). Hal itu berarti, masyarakat sebagai obyek ilmu sosial harus dipandang sebagai fakta netral. Pendirian tersebut akhirnya menggiring penganut positivisme kepada suatu keyakinan bahwa proses penelitian dipisahkan dari tindakan etis, pengetahuan dipisahkan dari penilaian atau kepentingan. *Kedua*, tujuan bidang disiplin sama yakni mencari dalil-dalil umum. Suatu gejala atau peristiwa yang terpisah dari peneliti selalu muncul dengan bergantung pada kondisi luar atau obyektif dan dengan demikian, gejala itu selalu bisa diulang dengan cara menciptakan kondisi yang sama. *Ketiga*, hubungan teori dan praksis bercorak teknis. Ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial, harus bersifat teknis instrumental.⁸ Artinya, pengetahuan harus dipakai untuk keperluan apa saja, sehingga tidak bersifat etis; atau ilmu-ilmu sosial harus bekerja dengan bebas nilai. Dalam positivisme rasio didominasi oleh sifatnya yang instrumental atau teknologis. Rasio instrumental harus dikritik sebagai cara pikir afirmatif terhadap kenyataan yang represif. Rasio jenis tersebut hanya tertarik dengan ‘bagaimana’ mengerjakan sesuatu, dan bukan dengan ‘apa’ yang seharusnya dikerjakan (dimensi etis).

Sebagai pembaharu teori kritis generasi pertama, Habermas menilai generasi pendahulunya jatuh pada sikap pesimis terhadap teori mereka sendiri. Menurutnya, daya rasio yang bersifat kritis terkungkung dalam dominasi total teknologi (instrumental) sebagai basis legitimasi kekuasaan yang ada, dan karena itu rasio kehilangan fungsi kritisnya. Karena kehilangan fungsi kritisnya, rasio hanya bertindak afirmatif terhadap kenyataan sosial yang nyata-nyata represif. Akan tetapi, Habermas menandakan dominasi ideologis tersebut tidak bersifat total. Hal itu karena transformasi sosial masih bisa diperjuangkan melalui dialog-dialog emansipatoris dan bukan dipaksakan secara revolusioner melalui jalan kekerasan. Hanya melalui jalan ‘komunikasi’ dan bukan melalui jalan ‘dominasi’ boleh diharapkan terciptanya masyarakat demokratis radikal yaitu masyarakat yang berinteraksi dalam suasana komunikasi bebas penguasaan.

Selain itu, penindasan total dalam kesimpulan generasi pertama menurut Habermas justru disebabkan oleh pendirian mereka sendiri yang tidak melihat paradigma lain selain paradigma kerja versi Karl Marx. Emansipasi dalam konteks paradigma kerja ini akan selalu menghasilkan perbudakan baru karena kerja berarti penguasaan. Menurut Habermas, kerja dan

⁸Bahan Kuliah Dr. Matias Daven dalam Filsafat Ilmu Pengetahuan.

interaksi adalah dua jenis aktivitas manusia yang berbeda. Rasionalitas dalam tindakan instrumental (kerja) melapangkan jalan bagi pertumbuhan kekuatan produktif serta memperluas kontrol teknis atas alam. Sedangkan, rasionalitas dalam dimensi interaksi sosial melapangkan jalan bagi terciptanya komunikasi bebas penguasaan. Dengan demikian, emansipasi tidak begitu saja disamakan dengan kemajuan teknologi. Bahaya bagi kehidupan sosial adalah tendensi universalisasi rasionalitas teknologis pada segala bidang kehidupan manusia. Perlu membuat distingsi antara kerja dan interaksi melalui beberapa level: pada level 'kuasi-transendental', Habermas membedakan kepentingan teknis dari kepentingan praxis, yaitu dorongan untuk hidup dengan benar yang menunjang proses komunikasi bebas-dominasi. Pada level metodologi Habermas membedakan ilmu-ilmu empiris-analitis dari ilmu-ilmu budaya (ilmu-ilmu historis-hermeneutis). Penelitian dalam masing-masing ilmu ini sejak semula dipandu oleh kepentingan yang berbeda-beda. Pada ilmu-ilmu empiris analitis misalnya dipandu oleh kepentingan untuk mengawasi dan mengembangkan kemampuan teknis manusia untuk menguasai alam, menjadikan alam sebagai lingkungannya yang manusiawi. Sedangkan, penelitian dalam ilmu-ilmu historis-hermeneutis sejak awal dipandu oleh kepentingan mempertahankan dan memperluas intersubjektivitas dalam komunikasi. Hal itu karena jalan untuk mendekati kenyataan bukannya melalui observasi, melainkan melalui pemahaman. Ujian terhadap salah-benarnya pemahaman tersebut tidak dilaksanakan melalui tes yang direncanakan, melainkan melalui interpretasi. Interpretasi yang benar akan meningkatkan intersubjektivitas, sedangkan interpretasi yang salah akan mendatangkan sangsi. Selain itu, penelitian dalam ilmu-ilmu kritis dipandu oleh kepentingan emansipatoris yaitu kepentingan untuk mengguncangkan kembali lapisan kesadaran yang non-reflektif yang menjadi kondisi yang sangat cocok bagi munculnya hubungan-hubungan yang bersifat ketergantungan. Tujuan tersebut dicapai dengan cara *self-reflection*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan teori kritis Habermas bersifat realistik (relevan) dalam mencegah praktik *human trafficking* di NTT dalam konteks relasi sosial.

***Human Trafficking* dalam Perspektif Teori Kritis Jürgen Habermas**

Teori kritis Jürgen Habermas sangat penting di tengah polemik dan persentase *human trafficking* yang semakin meningkat.⁹ Sebab, teori kritis tersebut dapat membantu kita

⁹Berkaca pada data-data yang dipublikasikan oleh lembaga Advokasi, Eliminasi dan Pencegahan Pekerja Anak NTT.

untuk mengatasi praktik *human trafficking* secara lebih baik dari sisi relasi sosial. Dari sisi relasi sosial, praktik *human trafficking* mereduksi manusia secara eksistensial; atau menempatkan posisi manusia sebagai objek semata. Hal itu berarti praktik *human trafficking* bercorak a-simetris-dominasi demi memaksimalkan *self interest* yang bebas nilai (etis) karena menciptakan kebangkrutan moral; atau, praktik *human trafficking* bertendensi menguasai sesama karena memanfaatkan keadaan represif dari sesama yang lain dengan menggunakan rasionalitas instrumental. Hal itu karena rasionalitas instrumental bisa memperdaya sesama dalam keadaan represif karena akan tertarik dengan ‘bagaimana’ mengerjakan sesuatu untuk bisa keluar dari keadaan represif tersebut. Dengan demikian, praktik *human trafficking* menggambarkan suatu sikap ketidakpedulian terhadap sesama dan keadaannya, atau dapat dikatakan praktik tersebut menciptakan bahaya bagi kehidupan sosial karena manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain, serta (dalam bahasa Habermas) mengutamakan kepentingan teknis (instrumental) terhadap sesama sehingga menciptakan perbudakan karena nilai kerja dalam konteks *human trafficking* berarti penguasaan.

Berhadapan dengan polemik *human trafficking*, pertama, Habermas mengatakan rasio tidak boleh kehilangan fungsi kritisnya. Artinya, rasio instrumental harus dikritik sebagai cara pikir afirmatif terhadap kenyataan yang represif. Menurut Habermas, transformasi sosial masih bisa diperjuangkan karena, melalui daya kritis, rasionalitas bisa tertarik dengan ‘apa’ yang seharusnya dikerjakan (mempertimbangkan dimensi etis). Dengan begitu, cara kerja rasionalitas instrumental, yang bertujuan memenuhi *self interest* yang bebas nilai (etis) atau menguasai sesama, khususnya dalam kasus praktik *human trafficking*, bisa ditangkis lewat kesadaran berpikir yang kritis sekalipun dalam keadaan represif. Kedua, praktik *human trafficking* tidak menempatkan posisi manusia sebagai subjek. Dari sisi relasi (interaksi) sosial, menurut Habermas, keberadaan manusia harus dipahami sebagai subjek. Hal itu karena tujuan interaksi sosial bukan menciptakan kontrol atas orang lain sebagai obyek, melainkan saling memahami sebagai subyek-subyek yang sama; atau dalam interaksi sosial yang sehat diperlukan dialog yang setara dan harmonis untuk mencapai suatu pemahaman yang bersifat timbal balik (simetris). Dengan kata lain, bagi Habermas, interaksi sosial memiliki kepentingan praktis, yaitu dorongan untuk hidup dengan benar karena menunjang proses komunikasi bebas-dominasi. Kepentingan praktis ini pula yang mendorong tindakan yang disebut tindakan komunikasi. Tindakan komunikatif, selain bertujuan mencapai pemahaman timbal balik, juga hendak merealisasikan konsensus sosial, karena dengan konsensus itu manusia dapat hidup aman dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa rasionalitas komunikatif amat penting dalam interaksi sosial karena bertujuan mempertahankan dan

memperluas intersubyektivitas dalam komunikasi, khususnya dalam memahami keadaan represif dari sesama, dan bukan melalui jalan dominasi. *Ketiga*, ilmu-ilmu kritis, termasuk teori kritis Habermas, sejak awal dipandu oleh kepentingan emansipatoris yaitu kepentingan untuk mengguncangkan kembali lapisan kesadaran yang non-reflektif. Kesadaran akan relasi sosial yang bebas-dominasi sangat penting karena bertujuan mewujudkan kepedulian terhadap sesama dan keadaannya yang represif. Oleh karena itu, perlu dialog-dialog emansipatoris, sebagai bentuk respon langsung, antara pihak pemerintah daerah dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan serta masyarakat juga dalam memperjuangkan kesedarajatan dalam relasi sosial sebagai upaya membangun kehidupan (kebaikan) bersama, khususnya di wilayah NTT.

Pencegahan Terhadap *Human Trafficking*

Bertolak dari teori kritis Habermas, penulis menawarkan beberapa tindakan solutif sebagai variabel dari pendekatan teori kritis tersebut. Langkah pertama penulis hendak mengkaji pendekatan pada level individu. Dalam level individu tahap *treatment* mesti dilakukan sebagai bentuk dialog emansipatoris untuk mengupayakan penghilangan masalah secara tuntas dan proses pembatasan agar masalah tidak berkembang. Tahap *treatment* terdiri atas tiga tindakan, yakni rehabilitasi, preventif dan developmental (pemberdayaan). Tindakan rehabilitasi merupakan tindak pemulihan kepada para korban *human trafficking* karena mengalami gangguan psikis dan cacat fisik. Tindakan itu bisa dilakukan melalui bimbingan konseling, penyembuhan luka batin, dan sebagainya. Fokusnya ialah para korban dan melakukan perubahan terhadap kondisi yang dinilai sebagai *problem* sosial menjadi kondisi normal yang sepatutnya diharapkan dalam masyarakat. Pemerintah dan lembaga-lembaga sosial terkait memiliki tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan hidup para korban setiap hari selama proses rehabilitasi berlangsung. Perhatian mereka sangat membantu proses pemulihan kondisi para korban.

Tindakan preventif merupakan tindakan antisipatif (penyadaran) mengenai suatu masalah sosial kepada masyarakat setempat. Tindakan preventif penting dilakukan demi mencegah semakin bertambahnya jumlah korban dari suatu masalah sosial. Tindakan ini bisa diaktualisasikan melalui kegiatan seminar, sosialisasi, lokakarya dan tindakan pemberian informasi lainnya. Tujuannya ialah masyarakat mampu mengidentifikasi masalah sosial yang ada secara benar dan berkemampuan memprediksi efek apa yang ditimbulkan dari suatu kebijakan atau keputusan apabila dilakukan dan tidak dilakukan. Keterlibatan pihak pemerintah daerah melalui tindakan preventif secara terus menerus membantu rakyat NTT dalam proses mengetahui bahaya dari *human trafficking* dan bagaimana mengatasinya.

Sedangkan developmental (pemberdayaan) merupakan upaya meningkatkan kapasitas individu, kelompok dan masyarakat NTT ke arah yang lebih baik. Masyarakat diharapkan mampu menghadapi masalah sosial dalam hidupnya. Tindakan developmental amat penting dilakukan demi terwujudnya tindakan rehabilitasi dan preventif yang dilakukan sebelumnya. Developmental bisa dipahami sebagai tindakan pembatasan, pencegahan, dan penghilangan masalah sosial dalam kehidupan bersama sambil memperjuangkan *bonum commune*. Karena itu dibutuhkan partisipasi dari pihak pemerintah, lembaga sosial dan masyarakat sendiri demi memonitoring atau mengintervensi sebagai bentuk pelayanan terhadap para korban agar mengembangkan hidupnya secara lebih kreatif dan kondusif.

Kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan yang rendah juga menjadi alasan rakyat NTT berinisiatif merantau atau mengadu nasib di negeri lain, sekalipun itu melalui jalur ilegal. Realitas semacam ini sudah sepatutnya membutuhkan kepekaan dari pemerintah dan rakyat NTT secara luas. Kepekaan pemerintah ini termanifestasi melalui kebijakan yang pro masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau melalui pemberian modal dasar bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha mereka. Dalam konteks ini tindakan preventif sebelumnya amat penting dimana pemberian informasi atau pengetahuan membantu masyarakat mulai berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan usaha-usaha demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemerintah daerah NTT, aparat keamanan, dinas ketenagakerjaan, instansi keagamaan serta masyarakat harus bekerja sama dengan cara menjalani fungsinya masing-masing secara total dan penuh tanggung jawab agar tidak membiarkan begitu saja perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerjanya secara ilegal. Hal itu karena kerja sama tersebut bertujuan memajukan rakyat NTT sekaligus memerangi tendensi *human trafficking*. Dengan demikian, masyarakat NTT, secara ontologis, memiliki tanggung jawab yang riil untuk menghargai dirinya dan sesama 'yang lain' secara eksistensial. Ia tidak sekedar ada, tetapi berada sambil memberikan sumbangan yang positif bagi diri dan *the other*. Tujuannya ialah tercapainya relasi sosial yang setara atau bebas-dominasi untuk menciptakan kebaikan bersama.

Penutup

Human Trafficking telah menelan rakyat NTT dalam jumlah yang tidak sedikit. *Problem* ini semakin eksis keberadaannya karena keteledoran pun orientasi kepentingan yang hadir dalam rupa tawaran-tawaran yang menarik. Teori kritis Jurgen Habermas sangat membantu kita untuk melihat dengan jelas bagaimana seharusnya membaca dan menyelesaikan polemik *human trafficking* yang menggambarkan disorientasi relasi sosial.

Toeri Kritis Habermas semestinya dinilai sebagai interpretasi panggilan kepada intensionalitas terhadap semua rakyat NTT untuk terbuka terhadap kehadiran yang lain sebagai anugerah dan pemberian yang paling luhur. Keterbukaan itu mesti nampak nyata melalui tindakan yang mengusahakan kesederajatan relasi sosial, menghargai kehidupan, dan menghormati harkat-martabat 'yang lain'. *Human Trafficking* mesti dihentikan, sebab manusia bukan sejenis barang dagangan yang seluruh keberadaannya tidak dapat diukur dengan apa pun atau dieksploitasi begitu saja demi kepentingan segelintir individu atau golongan sosial tertentu. Kita perlu saling menghargai, saling mendengarkan, saling belajar bukan sekadar pada titik-titik kesamaan dengan "yang lain", tetapi lebih lagi pada titik-titik putus serta garis pisah. (...) Kita dipanggil, sekali dan sekali lagi untuk mengakui "yang lain".¹⁰ Semoga rakyat NTT mulai menyadari tanggung jawabnya kesederajatan relasi sosial terhadap 'yang lain'.

Rakyat NTT memang masih asyik dengan ketidakpedulian terhadap diri sendiri dan 'yang lain'. Terhadap kegelisahan ini Socrates katakan "terjatuh bukanlah kesalahan. Yang menjadi kesalahan adalah ketika kau tetap diam di tempat kau jatuh". Setiap kita layak hidup aman dan nyaman tanpa ejekan, makian, ancaman, intimidasi, dan tanpa harus menjadi komoditi dari diri sendiri maupun oleh 'yang lain'. Kita layak dicintai oleh diri kita sendiri. Kita layak memperjuangkan kesederajatan kita dalam relasi sosial; kesederajatan orang lain dalam relasi sosial pun begitu, sehingga kedamaian dan kesejahteraan sosial itu terbentuk secara nyata dalam kehidupan rakyat NTT setiap hari.

¹⁰John Mansford Prior, "Mengakui yang lain dalam *Jurnal Ledalero, Wacana Iman dan Kebudayaan*, vol. 8, no. 2, Desember 2009, hlm. 131-132.